

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradaban manusia semakin berkembang setiap waktunya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan peradabannya yang semakin berkembang dan kebutuhan akan hidup bersama dengan manusia lainnya, maka manusia terdorong untuk memiliki suatu perkumpulan. Perkumpulan tersebut sebagai suatu tempat berbagai kegiatan manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perkumpulan itu disebut pemerintahan. Hubungan antara manusia dan pemerintahan sangatlah erat. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pemerintahan. Sebagai contohnya manusia memerlukan sekolah, perkumpulan olahraga, perkumpulan agama, perkumpulan musik. Sedangkan pemerintahan memerlukan manusia sebagai faktor penggerak. Kegiatan pemerintahan tidak akan terlepas dari faktor manusia. Faktor hidup matinya pemerintahan dalam mencapai tujuannya tergantung pada keterlibatan dan keaktifan manusia.

Setiap pemerintahan beroperasi menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dipasarkan. Pengelolaan sumber daya tersebut akan membawa pengaruh terhadap usaha pencapaian tujuannya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan antara lain financial/modal, fisik/material, teknologi dan manusia. Sumber-sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin sehingga tujuannya tercapai.

Dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan, sumber daya manusia (SDM) menempati tempat atau posisi yang penting terkait dengan usaha pencapaian tujuan. Sebabnya sumber daya manusia sebagai pelaksana setiap kegiatan dalam pemerintahan. Betapapun baiknya peralatan yang dimiliki tanpa adanya faktor manusia tidak akan ada artinya. Tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) maka sumber daya yang lain tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Manusia yang menggerakkan dan membuat sumber daya yang lainnya bergerak.

Dalam sebuah instansi pemerintah, manusia yang melaksanakan tugas dan kewajibannya disebut dengan aparat. Mengingat betapa pentingnya posisi aparat dalam suatu pemerintahan, maka dalam pelaksanaan kegiatannya diperlukan aparat yang cakap dalam kemampuannya, kuat kemauannya, menghargai waktu, loyalitas yang tinggi pada pemerintahan, dapat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan pemerintahan di atas kepentingan pribadi serta bersikap disiplin dalam bekerja. Sebuah pemerintahan tentu tidak menginginkan aparat yang bekerja seenak hatinya tetapi menginginkan aparat yang bekerja dengan giat diikuti sikap disiplin kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kantor Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali ditemukan fakta empirik bahwa aparat kantor Desa Jawi-jawi dalam melaksanakan tugasnya masih sangat rendah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan masyarakat yang dinilai rendah seperti pelayanan dalam penyelesaian suatu surat, yang seharusnya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk

mendapatkan surat keterangan tapi karena masih kurangnya sumber daya manusia, hanya ada sebagian aparat Desa yang tau menggunakan komputer, masih kurangnya fasilitas kantor Desa yang memadai seperti belum adanya komputer, mesin print yang terkadang tidak lagi berfungsi dengan baik, dan masalah lain yang merugikan masyarakat sehingga menghambat pelayanan masyarakat Desa Jawi-Jawi.

Seorang aparat sudah sepatutnya dan seharusnya selalu mematuhi peraturan/ketentuan yang ada dalam Pemerintahan. Seperti halnya manusia yang lainnya, aparat tetaplah manusia biasa makhluk ciptaan Tuhan. Kadangkala aparat melakukan kesalahan dan tindakan menyimpang dari peraturan. Misalnya masuk kerja/masuk kantor terlambat, pulang kantor sebelum waktunya tanpa keterangan yang jelas, mengobrol seenaknya saat jam kantor, meninggalkan pekerjaan sesuka hatinya, tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, keluar dari kantor tanpa ijin, asyik membaca koran dan majalah seenaknya dengan meninggalkan pekerjaan sampai bermain game komputer. Bahkan saat jam kantor keluyuran tanpa keperluan yang jelas di luar kantor dengan masih memakai pakaian dinas. Kesemuanya ini akan menghambat pencapaian tujuan dan menimbulkan efek negatif bagi pemerintahan.

Adapun hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Hetty Fitria Rahmawati, menemukan beberapa fakta diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan di Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Karanganyar adalah :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar. Kepala Kantor bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan. Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap para kasi. Sedangkan Kasi mengawasi seluruh pegawai yang berada dalam lingkup seksinya. Kasi-kasi tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
 - b. Pengawasan yang diterapkan di Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar.
2. Pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan oleh masyarakat. Di katakan melekat karena kegiatan pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi pimpinan yang harus mengawasi semua anak buahnya. Salah satu jalur/cara dalam pengawasan melekat adalah berupa tindakan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh pimpinan. Tindakan inilah yang disebut pengawasan atasan langsung. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas. Di Tingkat Kabupaten khususnya Daerah Tingkat II Karanganyar yang melakukan pengawasan fungsional adalah Bawasda (Badan Pengawasan Daerah), BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Aparat pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap Bupati. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat ini dilakukan baik secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok.

3. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tidak melihat langsung pelaksanaan suatu kegiatan namun dilakukan dengan laporan maupun lewat saluran komunikasi.
4. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan, selama kegiatan, dan setelah kegiatan. Pengawasan ini dilakukan semenjak awal sampai proses akhir kegiatan, dilakukan secara terus menerus untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar tujuan pemerintahan yang telah direncanakan dapat tercapai, maka aparat perlu diarahkan sesuai dengan tujuan pemerintahan. Sehingga diharapkan aparat dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan yang telah dibuat. Untuk tetap dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan aparatnya agar tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan diperlukan adanya suatu tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut adalah dengan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Para ahli merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda. Seperti GR. Terry yang dikutip oleh Sulistriyo (2003) merumuskan fungsi manajemen menjadi empat yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Demikian pula dengan Henry Fayol yang dikutip oleh Sulistriyo (2003), merumuskan fungsi manajemen menjadi lima yaitu *Planning*, *Organizing*, *Commanding*, *Coordinating*, dan

Controlling. Sedangkan T. Hani Handoko (1995) menyebutkan fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), Pemerintahanan (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan arah kepada pemerintahan guna menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pemerintahanan dibutuhkan untuk dapat merancang bentuk pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan personalia meliputi penarikan, penempatan, latihan dan pengembangan, pemberian orientasi pada aparat. Kemudian aparat perlu diarahkan untuk dapat melaksanakan apa yang harus mereka lakukan. Untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur.

Sebagus apapun rencana, bentuk pemerintahan, personil yang handal yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya namun faktor pengawasan tetap memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh T. Hani Handoko (2003) “Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*)”. Pengawasan atau *Controlling*, T. Hani Handoko (2003) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan pemerintahan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari aparat. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung yang disebut pengawasan melekat. Seperti yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi berpendapat bahwa:

Pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, memeriksa, dan mengevaluasi yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit pemerintahan kecil pemerintahan kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk diperbaiki atau disarankan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan (Hadari. 1995. h.8).

Pengawasan melekat bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi/peraturan yang telah ditetapkan sehingga apa yang dilaksanakan dapat berjalan secara efisien, selain itu juga untuk mengoreksi setiap pekerjaan aparat agar pelaksanaan kegiatan satuan pemerintahan lebih tertib dan disiplin, terhindar dari penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran.

Pengawasan terhadap para aparat desa sangatlah penting untuk meningkatkan disiplin kerja aparat desa, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien. Salah satu peraturan yang mengatur tentang disiplin aparat desa adalah Perdes No. 6 Th 2015 untuk mengatur kedisiplinan desa dalam menjalankan pelayanan desa. Dengan adanya peraturan dan pengawasan pimpinan atau atasan langsung diharapkan aparat dapat bersikap disiplin dalam bekerja. Dengan sikap disiplin yang dimilikinya akan membuat lebih mudah untuk melakukan pengarahan dan pelaksanaan kerja bukan bekerja atas dasar ketakutan

terhadap ancaman, hukuman, dan pimpinan. Namun diharapkan aparat dapat bekerja atas dasar kesadaran diri yang tinggi demi tercapainya tujuan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul *“Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Aparat Kantor Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali”*.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi penelitian ini pada peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparat kantor Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedisiplinan kerja aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?
2. Bagaimana peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedisiplinan kerja aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali.
2. Untuk mengetahui peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aparat Desa Jawi-jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, karena temuan penelitian ini adalah temuan yang bersumber dari fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen dalam aspek pengawasan terhadap aparat.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam upaya peningkatan disiplin, khususnya kantor Desa Jawi-jawi Kabupaten Morowali.

- 2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait aktivitas pengawasan kedisiplinan aparat.
- 3) Sebagai dasar acuan untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan hal-hal berikut:

1. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.
2. Disiplin kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sikap dan perilaku dari seseorang (karyawan/Aparat) yang selalu taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan Pemerintahan atau institusi baik yang tertulis maupun yang tidak untuk pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dengan sebaik-baiknya serta tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.